

BUDAYA GENDER DALAM MASYARAKAT PERSPEKTIF TEMPORAL EKOLOGI DAN SOSIAL EKONOMI

Amiruddin Mustam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

amiruddinmustam@stainparepare.ac.id

Abstract: This paper discusses Indonesian women since time immemorial has been active in various economic activities to support the household economy. In the current information age the gait of Indonesian women in careers is getting more advanced and has occupied various business sectors. Besides it also appears as a comrade is a general perception that tends to degrade women's dignity, such as violence, and deviations from the normative culture of the Indonesian nation. Therefore, to maximize the potential of women in social aspects, it is necessary to create a new social order for women through empowering women resources that are crippled in the formation of three attitudes: attitude and behavior towards God's, attitudes and behavior towards self, and attitudes and behavior toward values - Community values.

Keywords: Gender, Ecology, Economics

Pendahuluan

Wanita selain memiliki keunggulan biologis alamiah, juga memiliki keunggulan social, yaitu perpaduan kualitas antara sifat peminim, seperti hangat, lembut penuh kasih sayang dan pengorbanan dengan sifat tegas, bertanggung jawab, kuat dan sebagainya. Pengakuan dan pengertian dunia terhadap pentingnya peranan wanita dalam pembangunan terus meningkat, karena wanita merupakan kelompok yang mewakili separuh dari penduduk dunia, dan dari segi pembangunan. Hal ini berarti mereka merupakan lebih dari separuh pelaku pembangunan dan lebih dari separuh pemanfaat pembangunan.

Diskusi tentang wanita dalam era modernisasi saat ini, tidak lagi mempersoalkan posisi wanita: apakah dia mulia atau hina, apakah ini manusia nomor dua, apakah ia pantas atau tidak pantas mengembangkan tugas-tugas sosial kemasyarakatan, akan tetapi diskusi-diskusi itu, di arahkan pada bagaimana memanfaatkan wanita pada kedudukan yang wajar, bagaimana mengemban aneka tugas dan berbagai tugas sosial kemasyarakatan dan sebagainya.

Negara Indonesia, dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 telah menempatkan wanita dalam harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan menempatkan hak dan kewajiban yang sama dengan pria sebagai warga Negara. Tahun 1978 mempunyai makna yang sangat penting bagi wanita Indonesia, tahun tersebut adalah pertama kali peranan wanita dan status wanita secara eksplisit mendapatkan pengakuan dalam GBHN. Peranan dan status wanita dalam masyarakat dan Negara semakin mendapatkan tempat yang mantap di Era Reformasi saat ini, dengan berbagai produk regulasi.

Pengakuan akan peran dan status wanita dalam GBHN produk Orde baru tersebut disamping berimplikasi pragmatis juga berimplikasi kelembagaan, sebagai wujud penyebaran dari Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pada intinya meningkatkan terciptanya integritas wanita dalam pembangunan yang meliputi tiga dimensi yaitu:

1. Prinsip peningkatan kedudukan dan peranan wanita
2. Prinsip kemitrasejajaran antara pria dan wanita baik dalam keluarga, dalam masyarakat maupun dalam melaksanakan pembangunan Nasional
3. Prinsip peran ganda wanita, yaitu keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara peranannya dalam masyarakat.

Tiga dimensi di atas, diatur dalam pedoman pelaksanaan mekanisme penataan peningkatan peran wanita pada era orde baru, sebagai implikasi pragmatis adalah diintegrasikannya program-program, peningkatan peran wanita dalam repelita yang mewajibkan alokasi sumber-sumber rasional bagi peningkatan peranan wanita, sedangkan implikasi kelembagaan adalah diletakkannya mekanisme yang bertanggungjawab meningkatkan peran dan status wanita dalam masyarakat dan Negara Indonesia.

Intervensi kebijaksanaan pemerintah seperti tersebut diatas yang ditujukan untuk wanita dalam wujud kebijaksanaan program dan proyek pembangunan, pada hakekatnya bertujuan untuk mengubah situasi obyektif wanita menuju situasi normatif, sehingga sosok kebijaksanaan program dan proyek pembangunan Nasional untuk wanita, adalah mereflesikan situasi normatif dan situasi obyektif empirisnya.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka masalah besar yang menjadi analisis dalam tulisan ini adalah bagaimana menciptakan situasi normatif bagi wanita dalam eksis dan peran aktif dalam aspek sosial, sehingga tidak terjadi penyesalan dan kekecewaan yang menjadi penyerta dibalik harapan dari peran aktif wanita.

Beberapa Pandangan Tentang Sosial Wanita

Wanita adalah benda pengatur rumah tangga, demikian pandangan sinis orang Yunani, Aristoteles berpendapat, adalah wajar apabila kaum pria dewasa mengendalikan kaum wanita, oleh karena wanita makhluk yang tak sempurna, Immanuel Kant, menempatkan sebagai makhluk yang lemah akalnya, sehingga tak mampu mengetahui hal-hal yang prinsipil.

Tokoh lain yang memiliki pendapat serupa terdapat nama-nama seperti, Adolf Hetler dan Benrholdt Thomson. Adolf Helter berpendapat bahwa wanita hanya baik buat dapur, anak-anak dan pakaian dengan istilah 4 K yaitu Kirche, Kurche, Kindor dan Kicider. Sementara Bernholdt Thomsom, mengidentikkan posisi sosial wanita dengan kekastaan, menurutnya posisi wanita menyerupai posisi kasta dalam suatu masyarakat artinya dengan sistem kasta dan pilihan-pilihan lapangan kerjanya ditetapkan oleh suratan tangan melalui kelahiran.

Selain beberapa pendapat sinis terhadap wanita di atas, juga terdapat dua teori yang kontroversial tentang wanita yaitu teori natur dan kultur, dalam teori natur dinyatakan bahwa perbedaan kewajiban dan kemampuan antara wanita dan pria disebabkan oleh faktor bio-psykologi dan bio-sosial. Dalam teori kultur, perbedaan itu disebabkan oleh proses kultural dalam lingkungan mereka, bukan perbedaan psikologis dan biologis. Apabila lingkungan sosial cukup kondusif bagi pengembangan potensi wanita, maka potensi wanita dapat di maksimalkan seperti halnya pria. Teori Natur dengan aliran fungsionalisme, menganalogikan keluarga dengan struktur alam semesta, bahwa alam semesta mempunyai elemen-elemen yang memiliki fungsi masing-masing.¹

Fungsi elemen satu tidak dapat di ambil oleh elemen yang lain, jika masing-masing elemen menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan tercipta keseimbangan dialam ini. Demikian halnya dalam rumah tangga, fungsi ibu tidak dapat digantikan oleh ayah demikian juga sebaliknya. Wanita menjalankan fungsi ekspresif dalam rumah tangga

¹Rusli Cahyadi, *Dalam Antropologi Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. 45

dan pria melakukan tugas instrumental untuk urusan eksteren keluarga, maka dengan demikian akan tercipta keseimbangan dan kestabilan dalam rumah tangga dan masyarakat.

Aliran interaksionisme, menolak pembagian tugas pria dan wanita yang di dasarkan atas kodrat, aliran ini tidak menetapkan pembagian kerja antara wanita dan pria atau suami dan istri meskipun ada suatu pekerjaan yang di khususkan untuk salah satunya. Aliran feminisme moderat oleh Crossover menolak pandangan fungsionalisme yang melakukan pembagian kerja secara tegas antara wanita dan pria dengan alasan mementingkan keseimbangan dan keharmonisan, hal tersebut di pandang statis. Feminisme ekstrim menolak pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, bahkan menolak apa yang di sebut kodrat wanita atau pria, kodrat menurutnya hanya bentukan budaya (*cultural*).²

Ilmuan Indonesia yang berkomentar tentang integritas wanita antara lain Soelartina Sekadji dan Lukman Sutrisno. Soekadji menempatkan wanita sebagai makhluk emosional dan pria sebagai makhluk intelektual, menurutnya perbedaan tersebut di sebabkan karena tuntutan masyarakat wanita diuntut agar menggunakan rasa sebab di saat merawat bayinya tidak perlu menggunakan rasio oleh karena yang lebih tepat menggunakan rasa, intuisi dan empatinya.³

Sutrisno menulis bahwa istilah kodrat bagi wanita lebih sesuai bila diganti dengan istilah martabat sebab dengan istilah martabat, menempatkan manusia sebagai makhluk yang mempunyai potensi untuk maju dalam berbagai kemungkinan, sedangkan istilah kodrat

² Muhammad Natsir Mahmud, *Penelitian Sosial Keagamaan dan Penerapan dalam Penelitian Isu-isu Gender* (Makalah) 1994

³ Lukman Sutrisno, *Peranan Wanita dalam Pembangunan, Perspektif dalam Sosiologia*, (Yogyakarta: UGM Press, 1990), h. 32

sepertinya manusia terjebak dalam keadaan baku yang tidak bisa berubah, dan istilah kodrat selalu cenderung di peruntukkan bagi wanita, sedangkan istilah martabat di alamatkan pada pria. Hal ini jelas tidak adil karena menempatkan sisi perbedaan antara pria dan wanita yang pada hakekatnya sebagai manusia memiliki potensi yang sama.

Kiprah wanita dari berbagai Negara di dunia berjalan dari masa kemasa dengan versinya masing-masing di Prancis misalnya: emansipasi wanita muncul pada masa sesudah repolusi Perancis yang menuntut kebebasan dari kesewenang-wenangan dan kediktatoran penguasa. Sehingga pada tahun 1830 wanita Prancis berhasil membebaskan diri dari dominasi pria dengan menempati posisi guru. Pada tahun 1878 wanita Prancis mulai berjuang untuk menempati pekerjaan bidang industri.

Negara-negara di timur tengah kiprah wanita bermula dari awal. Keberadaan agama Islam yang mengajarkan persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita sekitar abad ke 7 masehi. Dan di Indonesia gerakan emansipasi wanita juga muncul pada masa revolusi menentang penjajahan, dan hingga tahun 1990-an kiprah-kiprah wanita Indonesia terus menanjak dan semakin sukses dalam karir mulai dari buruh pabrik, pegawai negeri sipil, pengusaha, olahragawan, politisi, antariksawan, hingga pejabat tinggi Negara.

Naisbitt dan Aburdeae dalam bukunya *Megatreads 2.000*, menulis bahwa kiprah wanita di abad informasi saat ini amat menonjol dan teknologi informasi modern yang berkembang pesat saat ini seolah-olah tidak dapat di pisahkan dari keberadaan wanita. Di bidang usaha bisnis dan managerial telah terjadi pergeseran drastic dimana telah banyak posisi yang tadinya di domonasi oleh kaum pria, kini di duduki oleh kaum wanita, tidak hanya di Negara-negara yang maju,

melainkan juga di Negara-negara industri baru, bahkan di Negara-negara berkembang sekalipun.⁴

Selanjutnya Naisbitt dan Aburdene dalam bukunya mengungkapkan data tentang kiprah wanita. Tahun 1990-an kaum wanita telah menunjukkan dominasi kuat di sektor informasi/ jasa dengan jumlahnya lebih dari 80 %. Profesi sebagai eksekutif, pengacara, dokter, insinyur dan peneliti pada tahun 1990-an hanya dimiliki oleh sebagian kecil kaum wanita pada tahun 1990-an persentase wanita yang menjadi dokter telah menjadi dua kali lipat, di sekitar kepengacaraan dn arsitek menjadi lima kali lipat. Wanita menguasai sekitar 39,9 % dari 14,2 juta pekerja eksekutif, administrasi dan menegemen.⁵

Akan tetapi fenomena lain yang sering menjadi penyerta dalam kiprah wanita dalam aspek sosial antara lain:

1. Kekerasan terhadap wanita, oleh kaum pria yang bisa terjadi setiap tingkat pendidikan, ekonomi, agama maupun suku bangsa, karena pada dasarnya kekerasan itu, terjadi akibat faham dunia yang masih di dominasi oleh kaum pria dan kaum wanita di hitung sebagai setengah manusia.
2. Pelecehan wanita terhadap lembaga perkawinan dengan persoalan yang sangat sensitive, yaitu penyelewengan wanita bersuami dengan istilah pria idaman lain dengan alasan yang bervariasi, terungkap sebagai berikut:
 - Karena kesepian 21 %
 - Kecewa pada kemampuan suami dalam rumah tangga 14 %
 - Pada relasi 13 %

⁴ John Naisbitt dan Patricia Aburdane, *Megatrends 2000, Sepuluh Arah Baru Untuk Tahun 1990-an* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1998), h. 233

⁵ John Naisbitt dan Patricia Aburdane, *Megatrends.....*, h. 235

- Mencari variasi hubungan seksual 10 %
- Mencari kepuasan bercinta 12 %
- Mencari pria ideal 7 %
- Gangguan seksual pada suami 6 %
- Berhubungan kembali pada pacar lama 5 %
- Suami punya simpanan lain 4 %
- Suami tidak mampu memberikan keturunan 1 %.

Kedua fenomena sosial wanita diatas sesungguhnya adalah merupakan penyimpangan yang tak dapat ditolerir, baik di lihat dari sudut budaya bangsa Indonesia, apalagi dilihat dari sudut pandang agama. Penyimpangan pertama dilakukan oleh kalangan pria, dengan pelecehan pada hak-hak dan tanggung jawab wanita dengan persepsi negative dan egoismenya kaum pria. Penyimpangan yang kedua adalah oleh kalangan wanita itu sendiri, yaitu pelecehan pada harkat, martabat dan kehormatannya, dengan pelanggaran pada aspek-aspek normative dari budaya bangsa Indonesia.

Untuk menghindari diskriminasi perceptual terhadap wanita seperti tersebut di atas yang dapat berdampak psikologis bagi wanita, maka perlu menciptakan persamaan opini dalam memberikan legitimasi bagi wanita dalam mengembangkan peran kariernya dalam masyarakat sehingga pembinaan kultur Nasional, khususnya yang berkaitan dengan peran karier wanita lebih sesuai dengan keyakinan yang hidup dalam masyarakat.

Sejak wanita pertama (Hawa) sudah terjun dalam berbagai aktivitas sosial, akan tetapi eksistensi wanita di masyarakat dari masa ke masa ditempatkan berdasarkan riak gelombang pemikiran manusia dan kultur masyarakat itu sendiri. Islam sebagai ajaran budaya yang

absolut, universal dan rasional, mencakup seluruh aspek kehidupan, telah menempatkan wanita dalam posisi yang sangat terhormat.

Al-Gazali dalam Shihab berpendapat, kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak di kenal oleh wanita-wanita ke lima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dari wanita barat dewasa ini, sedang berada pada posisi problema social yang amat serius, hal ini di sebabkan oleh karena kebebasan diukur dri kebebasan berpakaian dan pergaulan.⁶ Di Amerika di temukan satu dari tiga wanita telah pernah di perkosa selama hidupnya. Hustan Smith, menyatakan penyesalan setelah mengetahui bahwa di negaranya 1/3 dari gadis usia rata-rata 15 tahun telah aktif melakukan hubungan kelamin dan pada usia 16 meningkat menjadi 55 %.

Islam menurut Syackh Mahmud Syalthut ditemukan bahwa, tabiat kemanusiaan antara pria dan wanita di nyatakan sama, Allah telah menganugrahkan kepada wanita sebagaimana menganugrahkan kepad pria potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan persamaan potensi antara pria dan wanita, diantaranya surah Al-Najmi ayat 45-46:

Terjemahnya:

“Dan dia menciptakan kedua pasanga itu pria dan wanita dari Nuthfah bila dipancarkan”

⁶ Soehartina Soekadji, *Wanita Faktor yang Menentukan kedudukannya*, Media Jama'ah Shalahuddin No 4 April 1987

Dalam ayat tersebut di pahami bahwa kejadian manusia dalam dua jenis itu sama, yaitu berasal dari zygote, yakni penyatuan antara ovum dan sperma dalam hubungan seksual, yang berkonotasi persamaan potensial.

Dalam surah An-Nisa ayat 1 dinyatakan:

Terjemahnya:

“Wahai manusia bertaqwalah kamu kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari satu jenis dan menciptakan dari jenis itu pasangannya dan mengembangkan dari ke dua pasangan itu pria dan wanita yang banyak.

Dalam ayat tersebut menurut Muin Salim diungkapkan bahwa proses kejadian manusia (pria dan wanita) berasal dari satu jenis yang samayang dapat di pahami bahwa tidak ada perbedaan esensial antara pria dan wanita.⁷

Selain ayat-ayat yang menjelaskan tentang persamaan potensi di atas juga terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan hubungan kemitraan antara laki-laki dan wanita dalam aspek social, diantaranya terdapat dalam surah At-Taubah ayat 71:

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah awaliyah bagi yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi Rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Quraish Shihab menulis bahwa secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan

⁷ Muin Salim, *Hubungan Laki-laki Dan Wanita dalam Al-Qur'an*. IAIN Alauddin (Makalah), 1994

yang dilukiskan dengan kalimat, menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kata *Auliya* mencakup pengertian kerjasama, bantuan dan penguasaan, sedang mengerjakan menyuruh yang ma'ruf, mencakup segala segi kebaikan perbaikan kehidupan, termasuk memberi kritik kepada penguasa. Dengan demikian laki-laki dan perempuan harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar mampu melihat dan memberi saran, kritik dalam berbagai bidang kehidupan.

Tentang kemandirian dalam aktivitas ekonomi (karier) dapat di pahami ayat 32 surah An-Nisa dan ayat 21 surah At-Thur masing-masing sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki bagian dari kerjanya dan bagi wanita bagian dari kerjanya. Tiap orang bertanggung jawab atas usahanya”

Al-Qur'an juga menjelaskan adanya kerjasama dalam rumah tangga dalam hal tanggung jawab bersama, seperti terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

Terjemahnya:

“Dan ibu-ibu menyusui anaknya dua tahun dengan sempurna bagi mereka yang menyempurnakan penyusuan, dan atas bapak rezki dan pakaian mereka dengan cara yang baik”

Beberapa ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa pandangan Islam tentang sosial wanita, tidak seperti pandangan aliran fungsionalisme yang melakukan pembagian kerja secara tegas antara laki-laki dan wanita, yang menempatkan wanita hanya dalam batas produksi (mengembangkan keturunan) dan fungsinya hanya dalam lingkungan rumah tangga. Pandangan Islam juga tidak sejalan dengan

pandangan aliran feminisme ekstrim yang menolak keberadaan kodrat bagi wanita.

Islam menurut Shihab disamping mengakui tentang keberadaan kodrat bagi wanita (seperti melahirkan dan menyusui), juga membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Wanita sebagaimana di tulis Quraish Shihab boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam maupun di luar rumahnya baik secara mandiri maupun dengan orang lain, di lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam keadaan terhormat, sopan dan selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap dirinya dan lingkungannya.

Sosial Wanita Analisis Antropologi Feminis

Konteks wawasan pembangunan Nasional di dalam menyikapi perspektif-perspektif budaya, telah menempatkan manusia sebagai inti pembangunan, yaitu manusia Indonesia seutuhnya dalam dan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Mengapa demikian, jawabannya adalah, bahwa dalam kehidupan manusia memiliki cirri keistimewaan yang bersumber dari potensi kejiwaannya yang di sebut budi yang akan menciptakan budi-daya atau kebudayaan, yang kalau dapat ditumbuhkembangkan dalam diri setiap manusia, maka akan membangkitkan evolusi baru dalam berbagai bentuk kebudayaan. Termasuk di dalamnya budaya menciptakan system lingkungan yang lestari, dan budaya menciptakan sistem ekonomi yang handal.

Ditinjau dari sudut potensi manusia, muncul sebuah gagasan saling menggugat kemampuan wanita dengan kemampuan laki-laki seperti yang dimunculkan oleh kaum fungsionalisme dan kaum

feminism. Penganut aliran fungsionalisme menggugat kesetaraan pria dan wanita, sementara aliran feminis menggugat pernyataan keterbatasan wanita dibanding dengan pria. Gagasan saling menggugat ini, yang dimotori dua aliran di atas, maka dimunculkanlah istilah gender sebagai kajian antropologi, untuk melihat sisi-sisi persamaan dan sisi-sisi perbedaan kedua jenis gender ini, dari mana harus dibangun secara bersama-sama dalam realitas sosial, baik dari sudut sosio-kultural maupun dari sudut sosio-ekonomi dan dalam interaksi sosial lainnya dalam prikehidupan manusia. Analisis sosial wanita dalam pendekatan antropologi feminis, dalam tulisan ini dipertegas dalam berbagai perspektif.

Sosial Wanita dalam Perspektif Temporal

Konstruksi sosial yang membedakan peran dan kedudukan antar dua jenis gender dalam masyarakat yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial budaya. Gender tidak bersifat universal, bukan kodrat dan dapat berubah karena pengaruh perjalanan sejarah, perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, atau kemajuan pembangunan.

Telaah antropologi dalam perspektif temporal, adalah untuk melihat kelangsungan perubahan kedudukan wanita sebagai salah satu jenis gender yang mengacu pada periodisasi dan perubahan waktu dalam sejarah. Dalam kaitan perspektif waktu, Suhartono mengungkapkan bahwa perjalanan waktu sangat berpengaruh terhadap kedudukan dan peran gender baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Selanjutnya Suhartono membagi tiga periodisasi waktu dalam sejarah sebagai sistem sosial budaya yang di dalamnya mewadahi seberapa jauh gerak dan langkah perempuan dalam mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki sebagai dua jenis gender dalam masyarakat yaitu sistem sosial budaya feodal,

sistem sosial budaya kolonial, dan sistem sosial budaya pasca kolonial (sistem sosial budaya kemerdekaan).⁸

Apabila ditinjau dari sistem budaya feodal, sistem agraris sebagai tulang punggung kehidupan masyarakat, sehingga tanah mempunyai fungsi yang mendinamisasikan masyarakat. Pembagian kerja dalam sistem ini, berkaitan dengan struktur sosial masyarakat feodal yang terbagi dalam tiga kelompok sosial. Kelompok pertama disebut lapisan atas (keluarga raja), kelompok kedua disebut lapisan tengah (priyayi). Kedua kelompok ini adalah yang bebas kerja, mereka tinggal menikmati panen (hasil produksi). Kelompok tiga disebut sebagai lapisan bawah (wong cilik). Lapisan ini adalah kelompok penggarap sawah bagi kedua lapisan (kelompok sosial) di atas. Bagi kelompok ini pembagian kerja dilakukan dengan sistem patrilineal menempatkan laki-laki sebagai penggarap utama, sedangkan perempuan membantu untuk jenis pekerjaan yang ringan.

Bagi komunitas masyarakat feodal, pembagian kerja antara laki-laki dengan perempuan sangat eksak. Bahkan diperkuat dengan mitos-mitos tertentu dan kepercayaan tabu pada jenis pekerjaan tertentu dikerjakan oleh jenis kelamin tertentu. Selanjutnya dalam sistem sosial budaya Kolonial, tidak banyak perubahan, oleh karena pemerintah kolonial cenderung menyelenggarakan sistem yang ada selama masih menguntungkan. Akan tetapi dengan adanya sedikit perubahan dari sektor agraris ke industri pabrik yang membutuhkan tenaga profesional, akhirnya pemerintah Kolonial mendirikan sekolah-sekolah untuk mempersiapkan tenaga-tenaga profesional sesuai dengan kepentingan nasional.

⁸ Suhartono. *Gender Dalam Perspektif Temporal, Dalam manusia Dan Dinamika Budaya*, Editor. Sumjat, (Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM bekerjasama dengan BIGRAF Publisng, 2001), h. 44

Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial belum banyak membawa perubahan bagi perempuan secara umum, di samping sekolah untuk perempuan lebih terbatas dibanding dengan untuk laki-laki, juga legitimasi masyarakat bagi perempuan bersekolah sangat rendah karena sistem patrilineal dalam masyarakat sangat kuat. Akan tetapi keberadaan sekolah yang didirikan pemerintahan kolonial sempat melahirkan tokoh wanita seperti Kartini, Dewi Sartika, Walandouw, dan lain-lain yang menjadi pemikir emansipasi wanita.

Pada sistem sosial budaya kemerdekaan secara kualitatif adalah sistem budaya yang legitimik bagi perempuan untuk memposisikan diri dalam peran sosial, oleh karena era kemerdekaan adalah era egoliter yang mendapatkan laki-laki dan perempuan setingkat, dengan mendasarkan pada motif kemampuan masing-masing. Landasan kualitatif yang menunjang pemikiran di atas dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1995 yang antara lain menjamin persamaan hak dalam memperoleh pendidikan.

Menurut Suhartono, perubahan-perubahan sosial masa kemerdekaan mendorong emansipasi secara menyeluruh. Berbagai jenis dan tingkat pekerjaan yang pada dasarnya dapat dikerjakan oleh perempuan.⁹ Bahkan untuk wong cilik, pekerjaan-pekerjaan yang semula dikerjakan laki-laki sudah mulai dirabah oleh perempuan. Peran perempuan untuk golongan atas dan tengah telah bergeser dari kanca wingking menjadi kanca samping. Secara kuantitatif John Naisbitt dan Patricia Aburdane mengungkapkan data tentang kiprah wanita tahun 1990-an telah menunjukkan dominasi kuat di sektor

⁹ Suhartono. *Gender*, h. 65

informasi/ jasa wanita telah menguasai sekitar 39, % dari 14,2 juta pekerja eksekutif, administrasi dan manajemen.¹⁰

Sosial Wanita Dalam Perspektif Ekologi.

Analisis antropologi dalam perspektif ekologi adalah melihat keterlibatan manusia secara gender dalam program keluarga berencana, yang berimplikasi pada kelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk yang besar yang tidak disertai dengan kebijakan kependudukan, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kebutuhannya, yang akhirnya akan menimbulkan masalah pada lingkungan hidup manusia itu sendiri. Dari sudut teori lingkungan, ada dua pandangan yang paling mendasar yang dianut oleh teoritis lingkungan yang terkait dengan akibat pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan pada saat ini dan di masa yang akan datang.

Kedua teori yang dimaksud adalah "tesis titik batas" dan "tesis gemah ripah".¹¹ Teori titik batas memandang hubungan pertumbuhan penduduk dan degradasi lingkungan secara pesimistis. Teori ini memandang bahwa: (1) Pertumbuhan ekonomi dan penduduk mempunyai batas yang pasti, (2) Batas tersebut sudah hampir tercapai, (3) Apabila batas tersebut terlalu dekat akan terjadi pelonjatan tingkat kematian di dunia, (4) Walaupun titik batas tersebut masih cukup jauh, pertumbuhan ekonomi dan penduduk harus dihentikan.

Penganut tesis titik batas ini, berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat adalah sebab utama kelaparan, polusi, kerusakan lingkungan serta pemborosan sumber daya. Sebaliknya penganut tesis

¹⁰ John Naisbitt dan Patricia Aburdane, *Megatrends...* h. 230

¹¹ Sofian Effendi & Reas Hasan, *Politik Perencanaan Kependudukan Indonesia, Singapura dan Pakistan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian kependudukan UGM, 1986), h. 3-4

gemah ripah memandang secara optimis mengenai hubungan manusia dengan lingkungannya. Mereka berpendapat bahwa:

1. Titik batas pertumbuhan hanya ada bila ilmu dan teknologi sudah tidak berkembang lagi
2. Walaupun ilmu dan teknologi sudah berhenti berkembang titik batas itu masih jauh.
3. Betapapun pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi manusia dan karenanya harus dilanjutkan.

Sekalipun kedua penganut tesis diatas berbeda dalam melihat hubungan pertumbuhan penduduk dengan lingkungan, akan tetapi mereka sepakat bahwa:

1. Titik batas itu perlu mendapat perhatian karena warga dunia sekarang perlahan-perlahan mendekati titik batas tersebut.
2. Yang berkewajiban memelihara keserasian hubungan penduduk dan lingkungan adalah manusia, sekalipun konsekwensinya harus mengurangi kebebasan individu.

Sejalan dengan pola pelestarian lingkungan hidup diatas, Emil Salim melihat bahwa akibat dari kesenjangan antara Negara maju (industri) dengan Negara berkembang mengakibatkan kerusakan lingkungan.¹²

Negara berkembang dengan budaya kemiskinannya berupaya memanfaatkan potensi alamnya, di samping untuk kebutuhan dalam negaranya, juga untuk pengembangan utang-utang luar negrinya. Sementara negara maju (industri) dengan budaya konsumsi berupaya mengimpor potensi SDA dari Negara-negara berkembang. Untuk mengatasi hal itu, kata Emil Salim ada dua hal yang perlu di

¹² Emil Salim. *Kebudayaan dan lingkungan Hidup kita*, Agus R. Saijono (ed). (Jakarta: Gramedia Pustaka Dalam Pembebasan Budaya Utama 1999), h. 210

kedepankan, *pertama*; ditegakkan etika lingkungan yang mengendalikan akal budi dan akal pikiran manusia dalam mengembangkan kegiatannya, sehingga tumbuh budaya lingkungan yang berlainan dengan budaya konsumsi. *Kedua*; Perlu menyeimbangkan antara kebutuhan materi dengan non materi sehingga terjadi keseimbangan antara kebutuhan setiap manusia. *Ketiga*; Pengembangan sikap yang mengendalikan perilaku anti sosial dan mendorong perilaku kesetiakawanan sosial.

Mengacu pada perilaku yang dikemukakan diatas, akan tercipta budaya lingkungan yang mendambakan tingkat konsumsi yang wajar dan tidak berlebihan yang memperkaya pemuasan kebutuhan non-material di samping kebutuhan material, yang menimbulkan kesetiakawanan sosial pada diri setiap manusia. Maka dipahami bahwa konsep gender sebagai pola membentuk keseimbangan memiliki kaitan signifikan jika disandingkan dengan pengaturan hidup harmonis yang di tunjang oleh lingkungan yang asri.

Sosial Wanita Dalam Perspektif Ekonomi

Analisis antropologi tentang sosial wanita dalam kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari analisis tentang keluarga. Keluarga dan ekonomi merupakan dua lembaga yang saling berhubungan, sekalipun tampaknya keduanya terpisah satu sama lain, demikian pendapat Andersen dan Hamphrey dalam Irwan Abdullah. Menurut Hafetz dalam Irwan Abdullah ketidakseimbangan berdasarkan gender mengacu pada ketidakseimbangan akses ke sumber-sumber yang langka dalam masyarakat.¹³

¹³Irwan Abdullah *Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial*, Jurnal Humaniora, Volume 15 No 3 Oktober 2003.

Sosial wanita dipandang dari sudut ekonomi dan ekologi terdapat titik persamaan. Ekonomi berasal dari dua kata *oikos* dan *nomos*, yang berarti norma atau peraturan rumah tangga, sedangkan ekologi juga terdiri dari dua kata, *oikos* dan *logos* yang berarti studi tentang organism di tempat tinggalnya. Dengan demikian ekonomi berkenaan dengan rumah tangga manusia, ekologi berkenaan dengan rumah tangga alam.¹⁴

Pengertian ekonomi di atas menuntut persamaan peran antara laki-laki dan wanita dalam budaya ekonomi, persamaan peran yang di maksud adalah menempatkan wanita sebagai kanca samping, bukan lagi sebagai kanca wingking seperti yang berlaku pada sistem budaya feodal dan kolonial.

Menempatkan perempuan sebagai kanca samping, dalam pengertian bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar di dalam membangun budaya ekonomi. Hanya saja “mitra sejajar” bukan berarti tanpa perbedaan, sebab tanpa perbedaan maka akan terjadi dualisme kepemimpinan di dalam rumah tangga, kepemimpinan suami dan kepemimpinan istri, atau akan terjadi pergantian kepemimpinan dalam rumah tangga, misalnya kepemimpinan suami dari priode sekian hingga priode sekian, dan dari priode sekian hingga priode sekian kepemimpinan istri. Upaya membangun budaya ekonomi dalam sebuah rumah tangga, istri boleh menjadi mitra sejajar, tetapi dalam kepemimpinan rumah tangga pemimpinnya hanya satu, dan yang satu itu adalah suami, inilah yang dimaksud oleh Al-Qur'an “Laki-laki adalah pemimpin wanita.

¹⁴ Nursid Sumaatmadja. *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya Dan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Alfabeta, 1998), h. 78-79

Marwah Daud Ibrahim berpendapat bahwa manusia ibarat sepatu, masing-masing sepatu memahami fungsi kekanan dan kekirinya. Adalah gila menukarkan masing-masing tempatnya, atau mengagungkan kesendiriannya dengan menafikan pasangannya, bahkan ia adalah sampah apabila berdiri sendiri. Begitulah manusia laki-laki dan wanita adalah sama, akan tetapi tidak mungkin fungsi keduanya dipersamakan identitas atau bahkan saling dipertukarkan.¹⁵

Selanjutnya dalam kaitan budaya ekonomi, Koentjaraningrat berpendapat, bahwa di dalam pembangunan ekonomi terdapat faktor lain. Selain faktor ekonomi yang menjadi penghambat, faktor yang dimaksud adalah faktor mental. Faktor mental menurutnya berkaitan dengan dua hal yaitu nilai budaya (*cultural value system*) dan sikap (*attitudes*). Sistem budaya berfungsi sebagai pedoman dan pendorong kelakuan manusia yang telah berakar dan sulit diganti, sedangkan sikap adalah kecenderungan yang berasal dari dalam diri individu untuk berkelakuan dengan pola tertentu.¹⁶

Dalam kaitan budaya gender, juga masih ditemukan sikap atau prilaku yang sering merendahkan harga diri dan mobilitas wanita, seperti yang ditulis Sudarwan Danim sebagai berikut: (1) Wanita karier yang dapat menapak sampai ke posisi manajemen puncak tidak dilihat sebagai prestasi, tetapi sebagai fasilitas prestasi pribadi; (2) Profesi kesekretariatan yang dijabat oleh wanita di banyak perusahaan, dihubungkan dengan kemungkinan terjadi affair, alat lobi, dengan alasan yang tidak rasional; (3) Profesi wanita sebagai foto model, artis film dan penyanyi, dipersepsi sebagai profesi yang tidak dapat

¹⁵ Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi, Emansipasi dan Transendasi Wcana Peradaban Dengan Visi Islam*. (Bandung, Mizan 1998), h. 47

¹⁶ Rusli Cahyadi, *. Dalam Antropologi Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2000, h. 113

dipisahkan dengan kebutuhan selera rendah; (4) Keindahan tubuh dan kecantikan wajah wanita lebih dilihat sebagai alat promosi atau produk; (5) Munculnya prostitusi, free sex, kumpul kebo, pemerkosaan, selalu diasumsikan sebagai kesalahan wanita; dan (6) Wanita dengan segala dimensinya kebanyakan dipakai wahana atau sumber humor, sentilan, atau objek kata-kata porno di masyarakat luas.¹⁷

Persepsi negatif terhadap wanita sebagai salah satu jenis gender sebagaimana dalam kutipan diatas menunjukkan bahwa belum adanya kaedah normatif budaya gender dalam masyarakat. Merendahkan harga diri dan mobilitas wanita, selain sebagai ketidakadilan gender juga muncul sebagai perilaku mengabaikan potensi wanita dalam pembangunan ekonomi, yang tidak hanya merugikan kaum wanita, tetapi juga merugikan masyarakat bangsa dan Negara dari segi sumber daya manusia.

Koentjaraningrat memprediksi, bahwa sebuah prekonomian tidak mungkin dapat dibangun apabila sikap saling merendahkan kualitas, sikap tidak bertanggung jawab dan berbagai cirri-ciri mental negatif lainnya masih berakar dan berada dalam mentalitas manusia Indonesia. Selanjutnya Koentjaraningrat menawarkan solusinya, bahwa untuk membangun mentalitas yang cocok bagi pembangunan ekonomi ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu unsur-unsur nilai budaya yang menghambat harus dirombak dan sikap-sikap negatif yang berkembang harus dipulihkan.

Penutup

Studi-studi tentang keunikan masing-masing budaya (*cultural relativism*) tentang relasi gender telah menunjukkan kontribusi

¹⁷ Sudarwan Danim, *Transformasi Sumber Daya manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara 1995), h. 55

antropologi feminis yang sangat signifikan dalam memahami ketidakuniversalan teori Barat yang menunjukkan *eurocentric bias* diterapkan pada masyarakat di belahan bumi lainnya, dan memunculkan teori-teori antropologi feminis yang menunjukkan suatu teori di suatu budaya tidak secara otomatis aplikatif di budaya lain.

Tugas antropolog feminis adalah mendekonstruksikan struktur tiga lapis dari bias laki-laki dengan memusatkan perhatian pada wanita dengan mempelajari dan menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh wanita. Tugas ini diawali dengan mengoreksi bias laki-laki dalam laporan dan membuat data baru mengenai wanita dan kegiatan mereka; yang dilanjutkan dengan mengerjakan dan merumuskan kembali teori antropologi, mendefinisikan kembali proyek-proyeknya bukan sebagai 'studi mengenai wanita tetapi sebagai 'studi mengenai gender serta memberikan kritik feminisme yang didasarkan pada dekonstruksi kategori wanita dan mengeksplorasi data lintas-budaya yang menunjukkan bias Barat dalam aliran utama teori feminisme.

Dalam budaya Indonesia, wanita sejak zaman dahulu kala telah aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi untuk mendukung perekonomian rumah tangga. Dan pada abad informasi saat ini kiprah wanita Indonesia dalam karier semakin maju dan telah menempati berbagai sektor usaha. Selain itu muncul pula sebagai penyerta yaitu persepsi umum yang cenderung merendahkan martabat wanita, seperti kekerasan, dan penyimpangan dari budaya normative bangsa Indonesia. Kekerasan dapat timbul karena perbedaan peran yang menolak antara dua jenis gender. Karena itu untuk memaksimalkan potensi wanita dalam aspek sosialnya, perlu menciptakan orde sosial baru bagi wanita lewat pemberdayaan sumber daya wanita, yang

bertumpuh pada pembentukan tiga sikap yaitu: sikap dan perilaku ber-Tuhan, sikap dan perilaku terhadap diri sendiri, dan sikap serta perilaku terhadap nilai-nilai kemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Budiman, Arief, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, PT. Gramedia Jakarta 1989
- Cahyadi, Rusli. *Dalam Antropologi Indonesia*. Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Danim, Sudarwan. *Transpormasi Sumber daya manusia*, Bumi Aksara 1995
- Djawanai, Stephanus. *Bahasa Dan Kekerasan, Dalam Manusia dan Dinamika Budaya*. Sumjati AS. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM bekerjasama dengan BiGRAF Publising, 2000.
- Effendi, Sofian & Reas Hasan. *Politik Perencanaan Kependudukan Indonesia, Singapura dan Pakistan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian kependudukan UGM, 1986.
- Harian Kompas Sabtu 2 September 1995, *Hasil Diskusi di Forum NGO, Menjelang Komprensi Dunia X Mengenai Wanita*.
- Irwan, Abdullah, *Penelitian Berwawasan Gender dalam Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Humaniora, Volume 15 No 3 Oktober 2003.
- Idrus, Nurul Ilmi, *Antropologi Feminis: Etnografi, Relasi Gender dan Relativisme Budaya di Indonesia*. ANTROPOLOGI INDONESIA Vol. 30, No. 3, 2006
- Ibrahim, Daud Marwah, *Teknologi, Emansipasi dan Transendasi Wcana Peradaban Dengan Visi Islam*. Bandung, Mizan 1998.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Mahmud, Muhammad Natsir, *Penelitian / Sosial Keagamaan dan Penerapan dalam Penelitian Isu-isu Gender (Makalah)* 1994
- Naisbitt, John dan Patricia Aburdane, *Megatrends 2000, Sepuluh Arah Baru Untuk Tahun 1990-an*, Jakarta Binarupa Aksara 1998.
- Soekadji, Soehartina, *Wanita Faktor yang Menentukan kedudukannya*, Media Jama'ah Shalahuddin no 4 April 1987

- Sutrisno, Lukman, *Peranan Wanita dalam Pembangunan, Perspektif dalam Sosiologia*, UGM Yogyakarta 1990.
- Suparlan Suhartono, *Konsep Dasar Filsafat, Ilmu Pengetahuan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin*, Ujung Pandang 1997.
- Suhartono. *Gender Dalam Prespektif Temporal, Dalam manusia Dan Dinamika Budaya*, Editor. Sumjat: Fakultas Sastra UGM bekerjasama dengan BIGRAF Publising, 2001.
- Salim, Emil, *Kebudayaan dan lingkungan Hidup kita*, Agus R. Saijono (ed). Jakarta: Gramedia Pustaka Dalam Pembebasan Budaya Utama 1999.
- Sumaatmadja, H. Nursid, *Manusia Dalam konteks Sosial, Budaya Dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alfabeta, 1998.
- Salim, H. Abd. Muin. *Hubungan Laki-laki Dan Wanita dalam Al-Qur'an*. IAIN Alauddin (Makalah), 1994.
- Suhartono, Suparlan. *Konsep Dasar Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Ujung Pandang PPS Universitas Hasanuddin, 1997.